

## EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PAJAK: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR

**Meirina Ikayanti, Inayati**

Program Pascasarjana Ilmu Administrasi, Departemen Ilmu Administrasi Fiskal,  
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia  
Email: meirina.ikayanti@ui.ac.id

### Abstrak

Bagi negara berkembang, perpajakan merupakan topik yang menantang dan telah menarik perhatian para peneliti. Meskipun pajak memiliki kontribusi yang besar sebagai sumber pendapatan negara, dalam implementasinya terdapat permasalahan berupa realiasi pajak yang tidak mencapai target. Untuk memerangi fenomena buruk ini, berbagai negara di dunia telah memasukkan pemeriksaan pajak ke dalam sistem perpajakan mereka. Dengan peran penting yang dimiliki oleh aktivitas pemeriksaan pajak, tulisan ini bertujuan menganalisis bagaimana pemeriksaan pajak agar efektif khususnya dalam konteks negara berkembang. Penelitian ini merupakan studi literatur. Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder dan dianalisis melalui teknik analisis data kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa efektivitas pemeriksaan pajak adalah konstruksi yang hanya dapat valid ketika tiga komponennya (probabilitas audit, probabilitas deteksi, dan sanksi) bekerja sama. Efektivitas pemeriksaan pajak adalah konstruksi holistik yang merupakan kombinasi dari berbagai bagian yang bekerja bersama dalam suatu sistem untuk memastikan pencegahan.

**Kata Kunci:** pajak; pemeriksaan pajak; efektivitas pemeriksaan pajak

### Abstract

*For developing countries, taxation is a challenging topic and has attracted the attention of researchers. Although taxes have a large contribution as a source of state revenue, in its implementation there are problems in the form of tax realization that does not reach the target. To combat this bad phenomenon, various countries in the world have incorporated tax audits into their tax systems. With the important role of tax audit activities, this paper aims to analyze how tax audits are effective, especially in the context of developing countries. This research is a literature study. Data were collected from various secondary sources and analyzed through qualitative data analysis techniques. The results show that tax audit effectiveness is a construct that can only be valid when its three components (audit probability, detection probability, and sanctions) work together. Tax audit effectiveness is a holistic construction that is a combination of various parts working together in a system to ensure prevention.*

**Keywords:** tax; tax audit; tax audit effectiveness

**Received: 2021-10-22; Accepted: 2021-11-05; Published: 2021-11-20**

---

<b>How to cite:</b>	Ikayanti, M., Inayati (2021) Efektivitas Pemeriksaan Pajak: Sebuah Tinjauan Literatur, <i>Syntax Idea</i> , 3(11), <a href="https://doi.org/10.36418/syntax-ideav3i11.1542">https://doi.org/10.36418/syntax-ideav3i11.1542</a>
<b>E-ISSN:</b>	2684-883X
<b>Published by:</b>	Ridwan Institute

## Pendahuluan

Baik di negara maju maupun berkembang, pemerintah harus berperan aktif dalam mencapai pertumbuhan ekonomi (Edame, G. E., & Okoi, 2014), (Kourula et al., 2019), (Nyadera et al., 2021). Selain itu, pemerintah juga melakukan pengeluaran publik yang besar bagi warganya untuk penyediaan fasilitas dasar dan layanan sosial lainnya. Oleh karena itu, untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar.

Kebijakan fiskal merupakan instrumen vital pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan berbagai pelayanan publik bagi masyarakat (Agu et al., 2015), (Bregante et al., 2020), (Ahuja & Pandit, 2020). Bagian penting dari kebijakan fiskal adalah perpajakan. Banyak ekonom percaya bahwa penerimaan pajak adalah salah satu faktor paling signifikan yang berkontribusi terhadap pertumbuhan suatu negara (Myles, 2000). Selain itu, penerimaan pajak telah memberikan lingkungan fiskal yang stabil dan dapat diprediksi untuk dapat membiayai pemenuhan kebutuhan berbagai pelayanan publik bagi masyarakat.

Akan tetapi, khusus bagi negara berkembang, perpajakan merupakan topik yang menantang dan telah menarik perhatian para peneliti. Banyak masalah yang diamati seperti administrasi pajak yang buruk dan gagalnya mengumpulkan pendapatan pajak yang memadai (Mahangila & Anderson, 2017), (Inasius et al., 2020). Di banyak negara berkembang, terlihat bahwa ada kapasitas administrasi pajak yang rendah untuk memantau kepatuhan wajib pajak dan potensi jumlah penerimaan pajak belum dikumpulkan secara efisien dan adil (Martin & Luke, 2010), (Ardanaz & Scartascini, 2013), (Garg et al., 2017). Padahal, di antara berbagai sumber dari mana pemerintah dapat menghasilkan pendapatan, pajak adalah yang paling penting dan paling dapat diandalkan memberikan kontribusi lebih banyak daripada sumber lainnya (Panadés, 2004), (Tepperová, 2019), (Tan et al., 2020).

Dalam peran penting yang dimilikinya, pajak memiliki efek ekonomi mikro (distribusi pendapatan dan penggunaan sumber daya yang efisien) serta dampak ekonomi makro (pada tingkat output kapasitas, lapangan kerja, harga dan pertumbuhan) (Stokan, 2019). Kebijakan pajak dilaksanakan untuk berbagai alasan, tujuan utama, termasuk sumber pendapatan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, alokasi sumber daya, redistribusi pendapatan dan mengurangi ketidaksetaraan yang timbul dari distribusi kekayaan di antara konsumen. (Romer & Romer, 2010) mengatakan bahwa kebijakan pajak diterapkan untuk membiayai defisit anggaran dan melawan pengaruh lain dalam perekonomian. Pemerintah menggunakan hasil pajak untuk menjalankan fungsi tradisional mereka, yang meliputi penyediaan barang publik, pemeliharaan hukum dan ketertiban, pertahanan terhadap agresi eksternal, pengaturan perdagangan dan bisnis untuk memastikan dukungan sosial dan ekonomi (Edame, G. E., & Okoi, 2014).

Meskipun pajak memiliki kontribusi yang besar sebagai sumber pendapatan negara, dalam implementasinya terdapat permasalahan berupa realiasi pajak yang tidak

mencapai target. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, masalah utama seringkali muncul berupa penghindaran pajak. Penghindaran pajak dalam hal ini berupa penolakan yang disengaja untuk membayar pajak. Untuk memerangi fenomena buruk ini, berbagai negara di dunia telah memasukkan pemeriksaan pajak ke dalam sistem perpajakan mereka.

Pemeriksaan pajak penting karena membantu pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan pajak yang sesuai yang diperlukan untuk anggaran, menjaga ketertiban dan stabilitas ekonomi dan keuangan, untuk memastikan bahwa pengembalian yang memuaskan disampaikan oleh wajib pajak, untuk mengatur tingkat penghindaran pajak dan penghindaran pajak, untuk memastikan kepatuhan yang ketat terhadap undang-undang perpajakan oleh wajib pajak, untuk meningkatkan tingkat kepatuhan sukarela oleh wajib pajak, dan untuk memastikan bahwa jumlah yang terutang dikumpulkan dan disetorkan kepada pemerintah (D'Agosto et al., 2018), (Steller & Pummerer, 2021), (de Sousa et al., 2018).

Menurut (Kirchler et al., 2008), pemeriksaan pajak adalah pemeriksaan atas laporan pajak individu atau organisasi oleh otoritas pajak terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku dan peraturan negara. Pemeriksaan pajak mempengaruhi pengumpulan pendapatan karena mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak yang meningkatkan pendapatan (Batabyal & Beladi, 2010), (Tedeschi et al., 2011), (Murray et al., 2020), (Abernathy, J. L., Finley, A. R., Rapley, E. T., & Stekelberg, 2021). Ini juga menentukan keakuratan pengembalian untuk memastikan pajak yang diajukan benar. Dengan pemeriksaan pajak kewajiban pajak dapat dengan mudah dinyatakan dan hal-hal yang perlu penyesuaian diidentifikasi. Ini juga membantu dalam mengumpulkan bunga dan denda pajak yang dengan demikian meningkatkan pengumpulan pendapatan. Pemeriksaan pajak juga membantu menerapkan perubahan untuk memberantas penghindaran (Kirchler et al., 2008), (Gangl et al., 2014), (Gangl, Hartl, et al., 2019), (Gangl, Hofmann, et al., 2019).

Dengan peran penting yang dimiliki oleh aktivitas pemeriksaan pajak, tulisan ini bertujuan menganalisis bagaimana pemeriksaan pajak agar efektif khususnya dalam konteks negara berkembang.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan studi literatur (*literature review*). Merujuk (Snyder et al., 2019), dalam studi literatur, data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder berupa jurnal, laporan-laporan, dokumen, dan lain sebagainya. Data kemudian dianalisis melalui teknik analisis data kualitatif.

### **Hasil dan Pembahasan**

Di bidang perpajakan, negara-negara berkembang menghadapi tantangan khusus sehingga setiap upaya untuk memahami perpajakan dengan cara yang sama seperti yang dipahami di negara-negara maju akan salah besar. Dalam memberikan kerangka

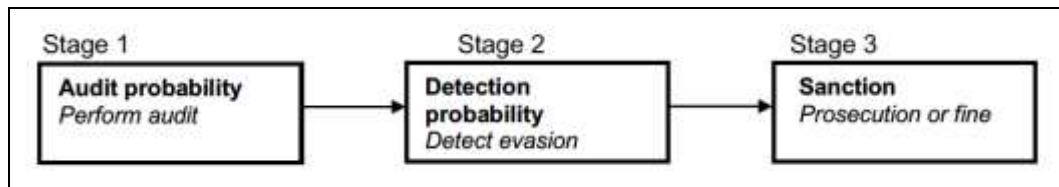
pemeriksaan untuk negara-negara berkembang (Umar et al., 2019) menjelaskan kerangka yang dipandu oleh kekhasan konteks negara berkembang.

Satu asumsi umum yang berjalan melalui konseptualisasi pemeriksaan dalam studi dari negara-negara berkembang adalah bahwa kemungkinan pemeriksaan mengarah pada deteksi (Marandu et al., 2015). Hal ini dapat diperhatikan bahkan dalam karya (Umar et al., 2019), di mana disimpulkan bahwa kemungkinan pemeriksaan dan denda menghalangi penghindar pajak potensial. Ada juga asumsi bahwa deteksi mengarah ke penalti. Hampir semua pendekatan ekonomi untuk mempelajari perilaku kepatuhan pajak mengikuti asumsi (Umar et al., 2019) sehingga melanggengkan pemikiran ini. Garis pemikiran ini menyatakan bahwa probabilitas audit memiliki efek jera pada wajib pajak (Slemrod et al., 2001).

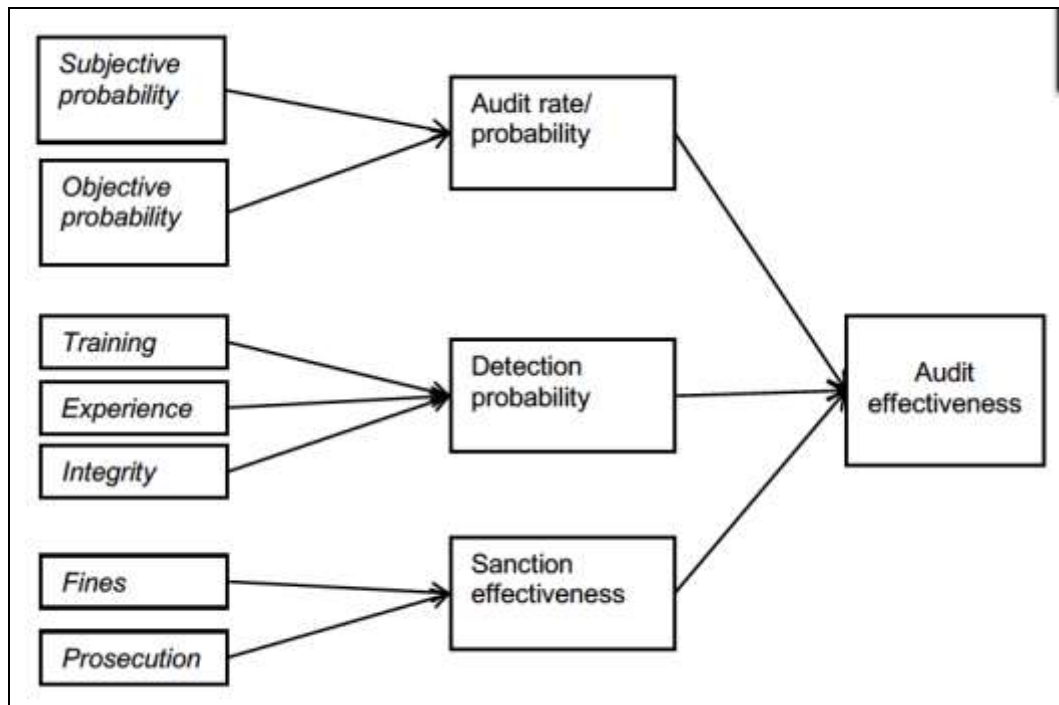
Akan tetapi, (Alm & McKee, 2006) menyelidiki probabilitas deteksi bersama probabilitas audit. Sebuah studi seperti (Inasius et al., 2020) menyelidiki efek terpisah dari probabilitas audit dan sanksi tetapi tidak melakukan deteksi. Oleh karena itu, (Umar et al., 2019) menjelaskan bahwa tiga aktivitas berbeda terlibat dalam keseluruhan audit yaitu sistem probabilitas (peluang atau tingkat audit), probabilitas deteksi, dan sanksi (denda atau penuntutan). Hal ini berbeda dengan penelitian yang lain karena beberapa penelitian memilih untuk menyelidiki probabilitas audit sebagai konstruksi yang berdiri sendiri (Inasius et al., 2020), (Dubin, 2007), sementara yang lain menyelidiki probabilitas deteksi (Alm & McKee, 2006). Lainnya menyelidiki pengaruh sanksi sebagai konsep yang berdiri sendiri (Inasius et al., 2020).

Proses pemeriksaan beroperasi secara bertahap dan beroperasi dalam suatu sistem dari kemungkinan seorang wajib pajak akan diaudit (yang tergantung pada tingkat audit), hingga kemungkinan deteksi (yang tergantung pada keterampilan auditor dan faktor-faktor lain) dan akhirnya hingga penuntutan atau denda jika penghindaran terdeteksi (ini tergantung pada tingkat supremasi hukum dan peradilan). Ini bukan sistem satu kali atau sistem sederhana. Sebaliknya, itu bisa menjadi proses yang panjang dan rumit, terutama di negara berkembang. Misalnya, kemungkinan pemeriksaan menentukan apakah seorang wajib pajak akan diaudit atau sebaliknya. Namun, tidak seperti negara maju, tingkat atau probabilitas audit tidak diterjemahkan ke deteksi otomatis di negara berkembang karena deteksi ditentukan oleh variabel lain seperti pengalaman dan integritas auditor (Wang, 2001). Lebih buruk lagi, bahkan jika deteksi dilakukan, denda atau penuntutan tidak secara otomatis dijamin di negara berkembang karena dapat membuat frustrasi oleh lembaga lain yang terlibat dalam sistem.

Seluruh sistem audit dibentuk oleh aliran kegiatan, seperti yang digambarkan pada Gambar 2 dari kemungkinan audit hingga sanksi (penuntutan atau denda). Proses audit diatur dalam sistem yang saling melengkapi di mana satu bagian mendukung yang lain untuk mencapai tujuan pencegahan yang holistik. Hal ini digambarkan pada Gambar 3.



**Gambar 2**  
**Aliran Kegiatan Pemeriksaan Pajak**  
**Sumber: Umar et al., 2019**



**Gambar 3**  
**Elemen Efektivitas Pemeriksaan Pajak**  
**Sumber: Umar et al., 2019**

Alur proses pada Gambar 2 menunjukkan tahapan pemeriksaan kepatuhan pajak sebelum mencapai tujuan pencegahan. Pertemuan pertama wajib pajak dengan sistem pemeriksaan adalah probabilitas pemeriksaan. Sebagaimana dicatat oleh (Umar et al., 2019), tahap ini sarat dengan ketidakpastian. Apakah wajib pajak akan diperiksa atau tidak? Berapa tingkat pemeriksaan, dan berapa peluang wajib pajak akan dipilih untuk diperiksa? Ini adalah titik kritis dalam proses audit.

Studi sebelumnya di negara maju menemukan bahwa kemungkinan besar audit mempengaruhi keputusan untuk patuh pada tahap ini. Di negara maju, hal ini dapat dimaklumi karena tahap satu dalam alur proses audit dapat dengan mudah mengarah ke tahap dua. Dengan kata lain, haruskah audit dilakukan (tahap satu), kemungkinan besar deteksi (tahap dua)? Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, kemajuan dari tahap satu ke tahap dua ini penuh dengan kesulitan di negara-negara berkembang.

Siapa pun atau kombinasi dari dua hal berikut dapat terjadi untuk menggagalkan perkembangan dari peristiwa audit ke deteksi. Pertama, auditor mungkin tidak memiliki pelatihan, pengalaman, dan peralatan yang diperlukan untuk mendeteksi penghindaran sehingga akan tetap terjebak pada tahap satu tanpa maju ke tahap dua (deteksi). Kedua, auditor mungkin memiliki kapasitas untuk mendeteksi, tetapi mengingat bahwa ia beroperasi dalam sistem pencarian rente, ia lebih memilih untuk melakukan kesepakatan suap dengan si penghindar. Mirip dengan skenario pertama, proses audit juga macet di tahap satu, gagal maju ke tahap dua. Implikasi dari analisis ini adalah bahwa, tidak seperti negara maju yang menemukan bahwa audit sangat mempengaruhi kepatuhan, negara berkembang berbeda. Probabilitas audit tidak selalu mengarah pada deteksi.

Selanjutnya, perkembangan kedua dalam alur proses audit adalah dari deteksi hingga sanksi (denda atau penuntutan). Studi dalam konteks negara maju telah melaporkan efek positif dari probabilitas deteksi pada kepatuhan pajak. Asumsi dalam penelitian ini adalah bahwa deteksi akan mengarah pada sanksi, penuntutan atau denda. Sekali lagi, ini kemungkinan besar terjadi di negara maju, tetapi dalam konteks negara berkembang, deteksi (tahap dua) dalam alur proses pada Gambar 3 mungkin tidak mengarah pada sanksi (penuntutan atau denda) yang merupakan tahap tiga. Mirip dengan perkembangan dari tahap satu ke dua, auditor dapat menukar sanksi untuk keuntungan pribadi.

Selain itu, bahkan jika auditor melaporkan kasus untuk kemungkinan sanksi, itu hanyalah awal dari proses yang panjang dan rumit yang mungkin tidak mengakibatkan tuntutan atau denda. Perlu dicatat bahwa auditor yang mengungkap penghindaran tidak sendiri bertanggung jawab untuk penuntutan. Pengadilan harus menuntut para penghindar yang dilaporkan oleh auditor. Di negara-negara berkembang, proses peradilan terkenal dengan upaya frustrasi yang ditujukan untuk menegakkan kepatuhan pajak (Everest-Phillips, 2010), (Afonso & Barroso, 2007).

Pendapat (Afonso & Barroso, 2007) yang meninjau reformasi administrasi pajak di Argentina, menyimpulkan bahwa perbaikan gagal menghasilkan pendapatan pajak yang lebih tinggi karena peradilan yang korup. Hal ini mendukung posisi bahwa audit hanya efektif ketika kasus malpraktik akhirnya dikenai sanksi (penuntutan atau denda). Tahap awal probabilitas audit atau probabilitas deteksi tidak dapat menentukan efektivitas sistem. Dukungan lebih lanjut untuk pendapat ini ditawarkan oleh (Everest-Phillips, 2010). Dia menceritakan kasus di Yaman di mana penghindar pajak bandel lebih suka kasus mereka dibawa ke pengadilan. Ini memungkinkan mereka untuk menghindari membayar jumlah yang harus dibayar saat proses pengadilan berlangsung, tetapi ini bisa memakan waktu antara tujuh hingga sembilan tahun. Kasus-kasus pengadilan, kemungkinan besar, tidak akan pernah selesai, dan bahkan jika diselesaikan, biayanya akan berkali-kali lipat lebih tinggi daripada jumlah pajak yang diperebutkan.

Selain sebagai aliran proses dari kemungkinan audit ke deteksi dan sanksi, tiga elemen sistem audit saling melengkapi sehingga menantang bagi siapa pun. Misalnya, jika probabilitas audit cukup sehingga audit sangat mungkin dilakukan, dan deteksi juga efektif, sanksi yang gagal akan membuatnya tidak berguna. Jika deteksi efektif dan

sanksi cepat dan efisien, penghindar tidak akan mengalami deteksi dan sanksi sampai mereka diaudit pada tingkat pertama (probabilitas audit). Jika mereka menghadapi nol kemungkinan audit, maka deteksi dan sanksi menjadi masalah. Demikian pula, ketika probabilitas audit dan sanksi efektif, celah dalam deteksi membuat dua yang pertama tidak berdaya.

### **Kesimpulan**

Efektivitas pemeriksaan pajak adalah konstruksi yang hanya dapat valid ketika tiga komponennya (probabilitas audit, probabilitas deteksi, dan sanksi) bekerja sama. Apa pun yang kurang akan mengurangi potensi efektivitas pemeriksaan pajak. Seperti yang ditekankan sebelumnya, argumen ini, meskipun sesuai untuk penelitian di negara maju, paling dapat diterapkan di negara berkembang di mana sistemnya tidak efektif dan rentan terhadap kebocoran dari semua bidang. Efektivitas pemeriksaan pajak adalah konstruksi holistik, yang itu merupakan kombinasi dari berbagai bagian yang bekerja bersama dalam suatu sistem untuk memastikan pencegahan.

### **BIBLIOGRAFI**

- Abernathy, J. L., Finley, A. R., Rapley, E. T., & Stekelberg, J. (2021). External Auditor Responses to Tax Risk. *Journal of Accounting, Auditing & Finance*, 36(3), 489–516.
- Afonso, J., & Barroso, R. (2007). Tax Systems and Tax Reforms in Latin America: Brazil. *Società Italiana Di Economia Pubblica Working Paper*, 58. [Google Scholar](#)
- Agu, S. U., Okwo, I. M., Ugwunta, O. D., & Idike, A. (2015). Fiscal policy and economic growth in Nigeria: Emphasis on various components of public expenditure. *Sage Open*, 5(4). [Google Scholar](#)
- Ahuja, D., & Pandit, D. (2020). Public expenditure and economic growth: Evidence from the developing countries. *FIIB Business Review*, 9(3), 228–236. [Google Scholar](#)
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. *Taxation: Critical Perspectives on the World Economy*, 3, 323–338. [Google Scholar](#)
- Alm, J., Jackson, B. R., & McKee, M. (1992). Estimating the determinants of taxpayer compliance with experimental data. *National Tax Journal*, 45(1), 107–114. [Google Scholar](#)
- Alm, J., & McKee, M. (2006). Audit certainty, audit productivity, and taxpayer compliance. *National Tax Journal*, 59(4), 801–816. [Google Scholar](#)
- Ardanaz, M., & Scartascini, C. (2013). Inequality and personal income taxation: The

origins and effects of legislative malapportionment. *Comparative Political Studies*, 46(12), 1636–1663. [Google Scholar](#)

- Batabyal, A. A., & Beladi, H. (2010). A theoretical analysis of income tax evasion, optimal auditing, and credibility in developing countries. *Journal of Theoretical Politics*, 22(1), 123–133. [Google Scholar](#)
- Bregante, D. T., Tan, J. Z., Schultz, R. L., Ayla, E. Z., Potts, D. S., Torres, C., & Flaherty, D. W. (2020). Catalytic consequences of oxidant, alkene, and pore structures on alkene epoxidations within titanium silicates. *ACS Catalysis*, 10(17), 10169–10184. [Google Scholar](#)
- D'Agosto, E., Manzo, M., Pisani, S., & D'Arcangelo, F. M. (2018). The effect of audit activity on tax declaration: Evidence on small businesses in Italy. *Public Finance Review*, 46(1), 29–57. [Google Scholar](#)
- De Sousa, A. M., Noriller, R. M., Huppel, C. M., Lopes, A. C. V., & Meure, R. M. (2018). Relation between the macroeconomic variables and the stock return in companies of the finance and insurance sector from Latin American stock market. *GCG: Revista de Globalización, Competitividad y Gobernabilidad*, 12(3), 20–30. [Google Scholar](#)
- Dubin, J. A. (2007). Criminal investigation enforcement activities and taxpayer noncompliance. *Public Finance Review*, 35(4), 500–529. [Google Scholar](#)
- Edame, G. E., & Okoi, W. W. (2014). The Impact of Taxation on Investment and Economic Development in Nigeria. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 3(4), 209–218. [Google Scholar](#)
- Everest-Phillips, M. (2010). State-building taxation for developing countries: Principles for reform. *Development Policy Review*, 28(1), 75–96. [Google Scholar](#)
- Fischer, C. M., Wartick, M., & Mark, M. M. (1992). Detection probability and taxpayer compliance: A review of the literature. *Journal of Accounting Literature*, 11, 1. [Google Scholar](#)
- Gangl, K., Hartl, B., Hofmann, E., & Kirchler, E. (2019). The relationship between Austrian tax auditors and self-employed taxpayers: Evidence from a qualitative study. *Frontiers in Psychology*, 10, 1034. [Google Scholar](#)
- Gangl, K., Hofmann, E., Hartl, B., & Berkics, M. (2019). The impact of powerful authorities and trustful taxpayers: evidence for the extended slippery slope framework from Austria, Finland, and Hungary. *Policy Studies*. [Google Scholar](#)
- Gangl, K., Torgler, B., Kirchler, E., & Hofmann, E. (2014). Effects of supervision on tax compliance: Evidence from a field experiment in Austria. *Economics Letters*, 123(3), 378–382. [Google Scholar](#)



- Garg, S., Goyal, A., & Pal, R. (2017). Why tax effort falls short of tax capacity in Indian states: A stochastic frontier approach. *Public Finance Review*, 45(2), 232–259. [Google Scholar](#)
- Inasius, F., Darijanto, G., Gani, E., & Soepriyanto, G. (2020). Tax Compliance After the Implementation of Tax Amnesty in Indonesia. *SAGE Open*, 10(4), 2158244020968793. [Google Scholar](#)
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. [Google Scholar](#)
- Kourula, A., Moon, J., Salles-Djelic, M.-L., & Wickert, C. (2019). *New roles of government in the governance of business conduct: Implications for management and organizational research*. SAGE Publications Sage UK: London, England. [Google Scholar](#)
- Mahangila, D., & Anderson, W. (2017). Tax administrative burdens in the tourism sector in Zanzibar: stakeholders’ perspectives. *SAGE Open*, 7(4), 2158244017736800. [Google Scholar](#)
- Martin, K. A., & Luke, K. (2010). Gender differences in the ABC’s of the birds and the bees: What mothers teach young children about sexuality and reproduction. *Sex Roles*, 62(3), 278–291. [Google Scholar](#)
- Murray, C. J. L., Aravkin, A. Y., Zheng, P., Abbafati, C., Abbas, K. M., Abbasi-Kangevari, M., Abd-Allah, F., Abdelalim, A., Abdollahi, M., & Abdollahpour, I. (2020). Global burden of 87 risk factors in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. *The Lancet*, 396(10258), 1223–1249.
- Musgrave, R. A. (1973). *Public finance in theory and practice*. McGraw-Hill Kogakusa. [Google Scholar](#)
- Myles, G. D. (2000). Taxation and economic growth. *Fiscal Studies*, 21(1), 141–168. [Google Scholar](#)
- Nyadera, I. N., Asal, U. Y., & Agwanda, B. (2021). The Role of Regional Organisations in Economic Growth Among Developing Countries: A Case of the Af DB. *India Quarterly*, 77(3), 384–403. [Google Scholar](#)
- Panadés, J. (2004). Tax evasion and relative tax contribution. *Public Finance Review*, 32(2), 183–195. [Google Scholar](#)
- Romer, C. D., & Romer, D. H. (2010). The macroeconomic effects of tax changes: estimates based on a new measure of fiscal shocks. *American Economic Review*, 100(3), 763–801. [Google Scholar](#)

- Slemrod, J., Blumenthal, M., & Christian, C. (2001). Taxpayer response to an increased probability of audit: evidence from a controlled experiment in Minnesota. *Journal of Public Economics*, 79(3), 455–483. [Google Scholar](#)
- Snyder, T. D., De Brey, C., & Dillow, S. A. (2019). Digest of Education Statistics 2017, NCES 2018-070. *National Center for Education Statistics*. [Google Scholar](#)
- Steller, M., & Pummerer, E. (2021). Auditor's Income Taxation and Audit Quality. *SAGE Open*, 11(3), 21582440211040830. [Google Scholar](#)
- Tan, B. Y. Q., Chew, N. W. S., Lee, G. K. H., Jing, M., Goh, Y., Yeo, L. L. L., Zhang, K., Chin, H.-K., Ahmad, A., & Khan, F. A. (2020). Psychological impact of the COVID-19 pandemic on health care workers in Singapore. *Annals of Internal Medicine*, 173(4), 317–320. [Google Scholar](#)
- Tedeschi, A., Lavini, A., Riccardi, M., Pulvento, C., & d'Andria, R. (2011). Melon crops (*Cucumis melo* L., cv. Tendral) grown in a mediterranean environment under saline-sodic conditions: Part I. Yield and quality. *Agricultural Water Management*, 98(9), 1329–1338. [Google Scholar](#)
- Tepperová, J. (2019). Personal Income Tax and Social Security Coordination in Cross-Border Employment—a Case Study of the Czech Republic and Denmark. *European Journal of Social Security*, 21(1), 23–41. [Google Scholar](#)
- Umar, M. A., Derashid, C., & Popoola, O. M. J. (2019). A multidimensional framework for understanding tax audit effectiveness in developing countries. *Indian-Pacific Journal of Accounting and Finance (IPJAF)*, 3(2), 4–14. [Google Scholar](#)
- Wang, S. (2001). The construction of state extractive capacity. *Modern China*, 27(2), 229–261. [Google Scholar](#)

---

**Copyright holder:**

Meirina Ikayanti, Inayati (2021)

**First publication right:**

[Syntax Idea](#)

**This article is licensed under:**

